



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024
DI KANDANGAN**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DI BANJARBARU**

Nomor : 7.A/LHP/XIX.BJM/5/2025

Tanggal : 23 Mei 2025



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 7.B/LHP/XIX.BJM/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Banjarbaru, 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Andriyanto, S.E., Ak., M.A.B.,
GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP, CSFA**

Hi H **Register Negara Akuntan Nomor 14655**

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah dan Persen)

NO	URAIAN	REF.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	17.677.350.593,00	19.817.957.627,02	112,11	17.998.220.856,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	164.643.732.604,00	19.579.363.980,72	11,89	5.974.690.084,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	6.530.246.663,00	7.151.180.130,00	109,51	7.004.148.066,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	18.234.673.480,00	182.342.646.720,28	999,98	179.819.122.335,90
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		207.086.003.340,00	228.891.148.458,02	110,53	210.796.181.341,90
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1	556.252.862.800,00	703.789.891.000,00	126,52	516.848.898.723,00
11	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.2	519.129.316.000,00	518.400.709.656,00	99,86	491.370.004.000,00
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	5.1.1.2.1.3	72.494.799.000,00	70.905.328.762,00	97,81	104.943.218.466,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	121.191.100.598,00	120.974.074.598,00	99,82	121.471.503.493,00
14	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		1.269.068.078.398,00	1.414.070.004.016,00	111,43	1.234.633.624.682,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.2.2	42.938.750.000,00	42.968.500.000,00	100,07	39.106.934.000,00
17	Dana Desa	5.1.1.2.2.3	109.594.295.000,00	109.594.295.000,00	100,00	111.423.331.000,00
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		152.533.045.000,00	152.562.795.000,00	100,02	150.530.265.000,00
19	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	73.127.575.020,00	131.403.258.184,00	179,69	133.955.221.252,00
21	Jumlah Transfer Antar Daerah		73.127.575.020,00	131.403.258.184,00	179,69	133.955.221.252,00
22	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		1.494.728.698.418,00	1.698.036.057.200,00	113,60	1.519.119.110.934,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	11.115.179.000,00	11.492.779.000,00	103,40	127.938.271,00
25	Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	5.904.652.800,00	0,00	0,00	0,00
26	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		17.019.831.800,00	11.492.779.000,00	67,53	127.938.271,00
27	JUMLAH PENDAPATAN		1.718.834.533.558,00	1.938.419.984.658,02	112,78	1.730.043.230.546,90
28	BELANJA DAERAH	5.1.2				
29	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	691.775.340.121,00	601.206.220.152,89	86,91	510.805.103.799,42
31	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	627.587.851.785,00	550.211.887.257,00	87,67	500.094.930.891,28
32	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	334.800.000,00	121.050.000,00	36,16	0,00
33	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	84.468.542.150,00	80.188.955.189,00	94,93	61.990.049.648,00
34	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	24.672.768.800,00	22.045.948.400,00	89,35	16.868.361.514,00
35	JUMLAH BELANJA OPERASI		1.428.839.302.856,00	1.253.774.060.998,89	87,75	1.089.758.445.852,70
36	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
37	Belanja Modal Tanah		4.655.370.501,00	4.111.328.007,00	88,31	8.730.800.952,00
38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		104.461.789.417,00	99.518.601.167,00	95,27	69.282.699.025,00
39	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		235.505.023.847,00	223.786.590.740,46	95,02	68.204.311.868,58
40	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		161.573.366.163,00	156.955.128.513,00	97,14	166.919.396.895,00
41	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.562.448.903,00	2.558.388.675,00	99,84	1.839.540.100,00
42	Belanja Modal Aset Lainnya		30.000.000,00	14.750.000,00	49,17	0,00
43	JUMLAH BELANJA MODAL		508.787.998.831,00	486.944.787.102,46	95,71	314.976.748.840,58

NO	URAIAN	REF.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
44	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
45	Belanja Tidak Terduga		43.771.921.105,00	2.877.798.000,00	6,57	2.922.935.000,00
46	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		43.771.921.105,00	2.877.798.000,00	6,57	2.922.935.000,00
47	BELANJA TRANSFER	5.1.3				
48	Belanja Bagi Hasil	5.1.3.1.1	2.605.109.600,00	2.605.109.600,00	100,00	2.628.865.000,00
49	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.2.1	222.240.802.000,00	222.240.802.000,00	100,00	188.369.741.000,00
50	JUMLAH BELANJA TRANSFER		224.845.911.600,00	224.845.911.600,00	100,00	190.998.606.000,00
51	JUMLAH BELANJA DAERAH		2.206.245.134.392,00	1.968.442.557.701,35	89,22	1.598.656.735.693,28
52	SURPLUS/DEFISIT		(487.410.600.834,00)	(30.022.573.043,33)	6,16	131.386.494.853,62
53	PEMBIAYAAN	5.1.4				
54	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
55	Penggunaan SilPA	5.1.4.1.1	493.526.600.834,00	493.526.600.834,19	100,00	380.140.105.980,57
56	Pencairan Dana Cadangan	5.1.4.1.2	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
58	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		523.526.600.834,00	523.526.600.834,19	100,00	400.140.105.980,57
59	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
60	Pembentukan Dana Cadangan		20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00
61	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		16.116.000.000,00	16.116.000.000,00	100,00	18.000.000.000,00
62	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		36.116.000.000,00	36.116.000.000,00	100,00	38.000.000.000,00
63	PEMBIAYAAN NETO		487.410.600.834,00	487.410.600.834,19	100,00	362.140.105.980,57
64	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	0,00	457.388.027.790,86	0,00	493.526.600.834,19


 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 SYAFRUDIN NOOR